



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jum'at 25 April 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Dishub Tutup U-Turn di Akses Masuk Lingkar Timur Buduran

Pengendara dari
Frontage Road Tak Boleh
Langsung Belok Kanan

SIDOARJO - Dishub Sidoarjo menutup U-turn di sekitar akses masuk ke Jalan Lingkar Timur Buduran dengan *water barrier* kemarin (24/4). Tujuannya, agar kendaraan dari frontage road tidak langsung menerobos masuk ke Jalan Raya Surabaya-Malang. Kabid Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisnu menjelaskan, di titik itu sebenarnya sudah terpasang rambu larangan. Kendaraan yang berasal dari frontage road dilarang belok ke kanan. "Harus ke kiri dulu. Masuk lingkar timur lalu putar balik," jelasnya. Namun, tidak sedikit pengendara yang melanggar. Mereka langsung menuju Jalan Raya Surabaya-Malang, melalui U-turn. Dampaknya terjadi

crossing dengan pengendara yang berasal dari arah barat. Kondisi itu tidak hanya membuat lalu lintas semrawut. Namun, juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Suatu menambahkan, tujuan awal pembuatan U-turn sebenarnya untuk putar balik pengendara dari arah timur. Begitu juga kendaraan dari utara yang mau masuk ke Banjar Kemantren. "Namun itu dulu sebelum adanya frontage road," terangnya. Setelah frontage road terbangun, Dishub menutup U-turn tersebut. Dia menerangkan, penutupan itu untuk antisipasi crossing kendaraan langsung setelah frontage road dibuka.

Suatu tidak menampik penutupan itu membuat pengendara dari frontage road harus menempuh jarak lebih panjang. Namun, kebijakan itu punya tujuan penting. "Bukan hanya mencegah crossing,



REKAYASA LALU LINTAS: Petugas memasang pembatas jalan di akses masuk Jalan Lingkar Timur Buduran kemarin (24/4). Tujuannya, para pengendara dari frontage road tidak menerobos.

tetapi juga hal yang tidak diinginkan," katanya. Misalnya, kecelakaan. Andy, salah seorang pengendara mengaku tidak kebe-

ratan. Yang penting baginya lalu lintas lancar. "Nggak masalah, memutar juga nggak jauh," ungkapnya. Nina, warga lain, meminta agar

rekayasa bisa dikaji. Apalagi jika nanti frontage road tersambung. "Mungkin bisa diberi traffic light. Kan lebih aman," paparnya. (edi/uzi)

Dapat Aduan, Disnaker Imbau Perusahaar Tidak Menahan Ijazah Pekerja

KOTA-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo mulai menaruh perhatian terhadap isu penahanan ijazah oleh perusahaan. Meskipun belum menerima laporan resmi secara tertulis, Disnaker mengaku telah mendapatkan aduan lisan dari seorang mantan pekerja.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari mantan pekerja yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya.

"Dia bekerja di salah satu perusahaan yang berlokasi di wilayah Berbek, Waru. Meski belum ada laporan resmi tertulis, kami tetap melakukan klarifikasi kepada perusahaan terkait," ujarnya kepada Radar Sidoarjo.

Disnaker saat ini masih menangani alasan penahanan dokumen tersebut. Ainun menuturkan, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan



Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia

Setahun Lumpuh, Warga Prambon Dapat Bantuan Perbaikan Rumah dari Baznas dan Pemkab Sidoarjo

22 April 2025

oleh @lagazim.com

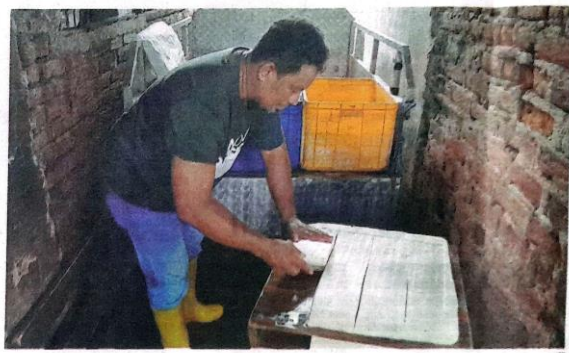


Harga Kedelai Naik, Disperindag Siapkan Operasi Pasar

KOTA-Kenaikan harga kedelai membuat sejumlah produsen tahu dan tempe di Kabupaten Sidoarjo kelimpungan. Lonjakan harga bahan baku tersebut memaksa mereka mengurangi volume produksi dan penjualan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Widiyantor Basuki, menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), mengingat sebagian besar pasokan kedelai di Indonesia masih berasal dari impor.

"Harga kedelai memang sangat dipengaruhi kurs dolar. Karena kedelai berasal dari luar negeri, saat dolar naik, otomatis harga kedelai juga ikut



MELONJAK: Produsen tahu membutuhkan bahan baku kedelai yang murah dan berkualitas.

melonjak," jelasnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Kamis (24/4).

Menanggapi kondisi tersebut, Disperindag Sidoarjo tidak tinggal diam. Widiyan-

toro menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah

• Ke Halaman 10

Pemkab Sidoarjo Launching Kurda Dengan Bunga 2% Per Tahun

@ Hari Kargo 24 April 2025 0



Bupati Lantik Ketua DPC PKDI

Sidoarjo, Memorandum

Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) se-Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029, resmi dikukuhkan Bupati Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (22/4). Pelantikan itu juga dihadiri Ketua DPD PKDI Jatim S Mahdi dan jajaran forkopimda.

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan sumpah, serta penyerahan bendera sebagai simbolis dari ketua DPD PKDI Jatim kepada Ketua DPC PKDI Sidoarjo terpilih, Budiono yang merupakan Kepala Desa Mangsan Wetan, Kecamatan Sukodono.

Bupati menyampaikan selamat atas pengukuhan dan pelantikan ini. "Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan



H Budiono

selamat atas dilantikannya PKDI Sidoarjo. Ke depan saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik," ujar Subandi.

la bahkan berjanji akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap program-program pembangunan desa. "Dengan bekerja sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada

kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, men-support seluruh program maupun kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Ketua DPC PKDI Sidoarjo Budiono usai pelantikan, mengatakan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat DPP. "Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus loyal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC Sidoarjo harus diartikan karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan AD-ART," ujarnya. (sudi/supe)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo

Dishub Tutup U-Turn di Akses Masuk Lingkar Timur Buduran

Pengendara dari Frontage Road Tak Boleh Langsung Belok Kanan

SIDOARJO - Dishub Sidoarjo menutup *U-turn* di sekitar akses masuk ke Jalan Lingkar Timur Buduran dengan *water barrier* kemarin (24/4). Tujuannya, agar kendaraan dari frontage road tidak langsung menerobos masuk ke Jalan Raya Surabaya-Malang.

Kabid Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisunu menjelaskan, di titik itu sebenarnya sudah terpasang rambu larangan. Kendaraan yang berasal dari frontage road dilarang belok ke kanan. "Harus ke kiri dulu. Masuk lingkaran timur lalu putar balik," jelasnya.

Namun, tidak sedikit pengendara yang melanggar. Mereka langsung menuju Jalan Raya Surabaya-Malang melalui *U-turn*. Dampaknya terjadi

crossing dengan pengendara yang berasal dari arah barat. Kondisi itu tidak hanya membuat lalu lintas semrawut. Namun, juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Sunu menambahkan, tujuan awal pembuatan *U-turn* sebenarnya untuk putar balik pengendara dari arah timur. Begitu juga kendaraan dari utara yang mau masuk ke Banjar Kemantren. "Namun itu dulu sebelum adanya frontage road," terangnya. Setelah *frontage road* terbangun, Dishub menutup *U-turn* tersebut. Dia menerangkan, penutupan itu untuk antisipasi *crossing* kendaraan langsung setelah *frontage road* dibuka.

Sunu tidak menampik penutupan itu membuat pengendara dari *frontage road* harus menempuh jarak lebih panjang. Namun, kebijakan itu punya tujuan penting. "Bukan hanya mencegah *crossing*,



REKAYASA LALU LINTAS: Petugas memasang pembatas jalan di akses masuk Jalan Lingkar Timur Buduran kemarin (24/4). Tujuannya, para pengendara dari frontage road tidak menerobos.

tetapi juga hal yang tidak diinginkan," katanya. Misalnya, kecelakaan.

Andy, salah seorang pengendara mengaku tidak kebe-

ratan. Yang penting baginya lalu lintas lancar. "Nggak masalah, memutar juga nggak jauh," ungkapnya. Nina, warga lain, meminta agar

rekayasa bisa dikaji. Apalagi jika nanti *frontage road* tersambung. "Mungkin bisa diberi *traffic light*. Kan lebih aman," paparnya. (edi/uzi)

Jawa Pos

DELT SIANA



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
ISENG: Petugas Damkar Pos Krian bersama Pilo (KIR) usai melepas boro dari tangannya pada Rabu (23/4).

Siswa SMP Tak Sengaja Terborgol

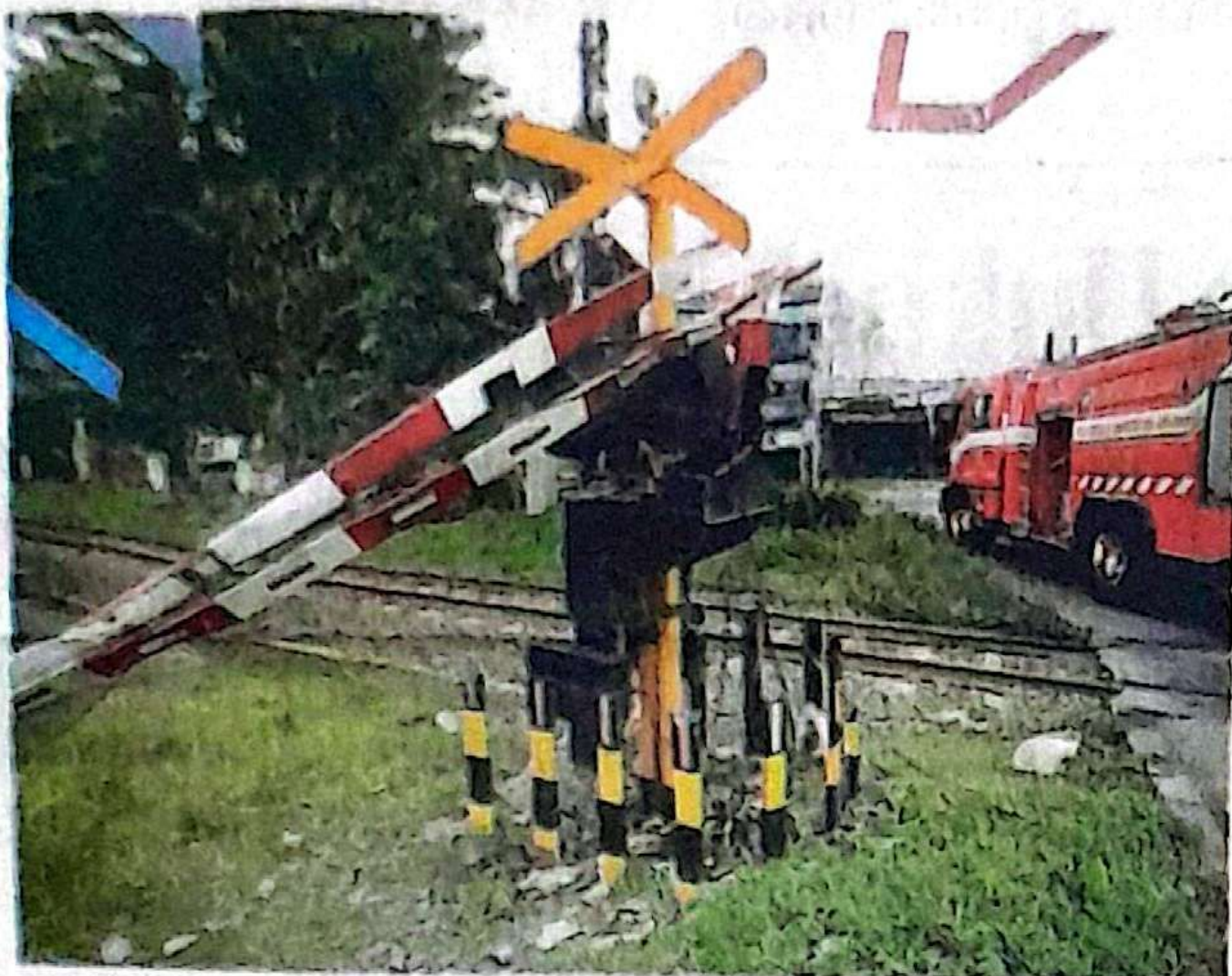
SISWA SMP bernama Fico datang ke Pos Damkar Krian dalam kondisi tangan terborgol pada Rabu (23/4). Dia minta tolong setelah gagal melepaskan sendiri borgol yang tak sengaja terkunci di pergelangan tangannya.

Komandan Regu 3 Rescue BPBD Unit Krian Ferry mengatakan, peristiwa itu bermula saat dia iseng memainkan borgol milik temannya. Tanpa sadar, ia mengunci borgol tersebut di kedua tangannya. "Karena tidak memiliki kunci, ia panik dan segera mendatangi Posko PMK Unit Krian untuk meminta bantuan," katanya.

Petugas Regu 3 Tim Rescue BPBD Sidoarjo langsung membantu mencopotnya. Proses pelepasan borgol berlangsung sekitar 30 menit. Ferry mengimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain dengan alat-alat yang berpotensi membahayakan. (eza/uzi)

Jawa Pos

KILAS DELTA



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BUTUH PERBAIKAN: Kondisi palang pintu kereta api di Banjarkemantren, Buduran, rusak karena tertabrak truk kemarin (24/4).

Tertabrak Truk, Palang Kereta di Banjarkemantren Patah

PALANG pintu perlintasan kereta api di JPL 49 Kecamatan Buduran rusak tertabrak truk kemarin (24/4). Petugas pun mengatur penyeberang secara manual.

Palang pintu JPL 49 itu berada di pertigaan Buduran-Banjarkemantren untuk menutup jalan Lingkar Timur yang mengarah ke

Buduran. "Petugas sudah di lokasi untuk pengawasan, ditabrak truk pukul 06.00," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara.

Dia menduga ada kendaraan besar yang menerobos saat palang pintu kereta akan diturunkan. Akibatnya palang pintu tersebut patah. "Bersama petugas dari pos jaga JPL 49, kami lakukan penutupan manual saat ada kereta lewat," ujarnya. Petugas membentangkan tali saat ada kereta lewat. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan perbaikan.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Lukman Arif mengimbau agar pengendara tidak nekat menerobos perlintasan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. "Kami imbau pengendara agar memperhatikan rambu-rambu yang ada sebelum perlintasan dan ikuti arahan dari petugas," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Luncurkan Kurda untuk UMKM, Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga super rendah, yakni hanya 2 persen per tahun.

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dengan angsuran ringan. Pinjaman Kurda tersedia hingga maksimal Rp 50 juta dan dapat diajukan langsung di BPR Delta Artha Sidoarjo.

Peluncuran Kurda 2025 dilakukan oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Pendapa Delta Wibawa, Kamis (24/4).



PEREKONOMIAN: Bupati Sidoarjo Subandi beserta perwakilan Forkopimda saat meluncurkan program Kurda.

Bupati Subandi menyampaikan bahwa peluncuran Kurda ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyebut, lebih dari 60 persen struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku UMKM.

"Penguatan UMKM menjadi bagian dari visi, misi, dan program prioritas kami. Ini bukan hanya jargon, tapi kebijakan nyata agar UMKM di Sidoarjo naik kelas dari mikro menjadi kecil, dari lokal ke nasional hingga

internasional," ujarnya.

Pemkab Sidoarjo telah menyempurnakan tata kelola pembiayaan UMKM melalui revisi regulasi. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2025 diterbitkan untuk menggantikan Perbup Nomor 52 Tahun 2023. Salah satu poin penting dalam peraturan baru ini adalah penurunan suku bunga Kurda menjadi hanya 2 persen per tahun untuk pinjaman maksimal Rp 50 juta.

"Ini bentuk nyata keberpihakan anggaran kepada ekonomi rakyat. Bahkan, anggaran subsidi

● Ke Halaman 10



Luncurkan Kurda...

bunga Kurda kami tingkatkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 5 miliar. Ini adalah investasi sosial demi akses modal yang adil, murah, dan aman bagi pelaku usaha kecil," tegasnya.

Hingga awal April 2025, BPR Delta Artha telah menyalurkan lebih dari 2.035 pembiayaan Kurda dengan total nilai lebih dari Rp 76 miliar. Bupati juga menekankan penting-

nya peran pemerintah desa dalam menyukseskan program ini.

"Saya minta seluruh kepala desa dan perangkat desa ikut menyosialisasikan, merekomendasikan, dan mendampingi warganya dalam mengakses Kurda. Kita dorong agar jumlah penerima terus meningkat," imbuhnya.

Direktur Utama PT BPR Delta Artha Persero, Sofia Nurkrisnaji, menyampaikan bahwa program Kurda

adalah wujud nyata dukungan Pemkab Sidoarjo dan BPR Delta Artha terhadap ekonomi lokal.

Tahun ini, pihaknya menargetkan sedikitnya 3.500 UMKM penerima manfaat, termasuk sektor pertanian dan perikanan produktif. "Target kami, minimal di setiap desa ada sepuluh UMKM atau lebih yang menerima fasilitas Kurda," jelasnya.

Sofia juga mengungkapkan bahwa penerima

Kurda 2025 akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Para penerima akan didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh BPR Delta Artha.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami kepada para pelaku UMKM penerima Kurda," tutupnya. (sai/vga)





PADAT MERAYAP: Perempatan Gedangan jadi salah satu titik kemacetan di Sidoarjo setiap harinya.

Flyover Gedangan Mulai Dibangun Tahun Depan, Masih Tahap Pembebasan Lahan hingga Kini

Perempatan Gedangan hingga kini masih menjadi salah satu titik kemacetan terparah di Kabupaten Sidoarjo, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat merencanakan pembangunan flyover di lokasi tersebut.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

NAMUN, hingga saat ini proyek tersebut belum memasuki tahap pembangunan fisik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan flyover masih

dalam tahap awal. Yakni review perencanaan kebutuhan lahan.

"Saat ini masih dalam proses pembebasan lahan dan penyesuaian dengan Detail Engineering Design (DED) dari kementerian atau Balai Besar Pelaks-

anaan Jalan Nasional (BB-PJN) Jawa Timur-Bali," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Kamis (24/4).

Dwi Eko menyebutkan bahwa DED tersebut akan menjadi acuan utama dalam menentukan luasan lahan

● Ke Halaman 10



Flyover Gedangan...

yang perlu dibebaskan.

Serta sebagai dasar sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai.

"Mudah-mudahan pem-

angunan fisiknya bisa dimulai tahun 2026. Untuk tahun ini, kami fokus menyelesaikan pembebasan lahan terlebih dahulu," tambahnya.

Ia juga menjelaskan

bahwa rencana pembangunan flyover ini sebenarnya sudah lama digagas oleh pemerintah pusat. Pemkab Sidoarjo hanya diminta untuk menyiapkan kebutuhan lahan agar pro-

yek tersebut bisa segera dilaksanakan.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar prosesnya tidak berlarut-larut," pungkasnya. (sai/vga)



Dapat Aduan, Disnaker Imbau Perusahaan Tidak Menahan Izazah Pekerja

KOTA-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo mulai menaruh perhatian terhadap isu penahanan izazah oleh perusahaan. Meskipun belum menerima laporan resmi secara tertulis, Disnaker mengaku telah mendapatkan aduan lisan dari seorang mantan pekerja.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari mantan pekerja yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena izazahnya masih ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya.

"Dia bekerja di salah satu perusahaan yang berlokasi di wilayah Berbek, Waru. Meski belum ada laporan resmi tertulis, kami tetap melakukan klarifikasi kepada perusahaan terkait," ujarnya kepada Radar Sidoarjo.

Disnaker saat ini masih mendalami alasan penahanan dokumen tersebut. Ainun menuturkan, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan

● Ke Halaman 10



Kepala Disnaker Sidoarjo,
Ainun Amalia



Dapat Aduan,...

bagian HRD perusahaan untuk mengetahui apakah ada kewajiban atau tanggungan yang belum diselesaikan oleh pekerja.

"Mungkin ada tanggungan tertentu dari yang bersangkutan, tapi kami masih melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan

perusahaan," jelasnya.

Ainun menegaskan, jika tidak ada dasar hukum yang sah, praktik penahanan izazah oleh perusahaan bisa dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh perusahaan di wilayah Sidoarjo untuk tidak melakukan tindakan semacam itu.

"Kami berharap tidak

sampai terjadi persoalan hukum. Karena itu, kami imbau perusahaan yang masih menahan izazah karyawan agar segera mengembalikannya," tegasnya.

Disnaker Sidoarjo belum merencanakan pembukaan posko pengaduan khusus untuk kasus penahanan izazah.

Namun demikian, jika ke depannya muncul laporan-laporan serupa, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan posko aduan.

"Meski saat ini belum ada posko, masyarakat tetap bisa datang langsung ke kantor Disnaker jika mengalami kasus serupa," pungkas Ainun. (sai/vga)

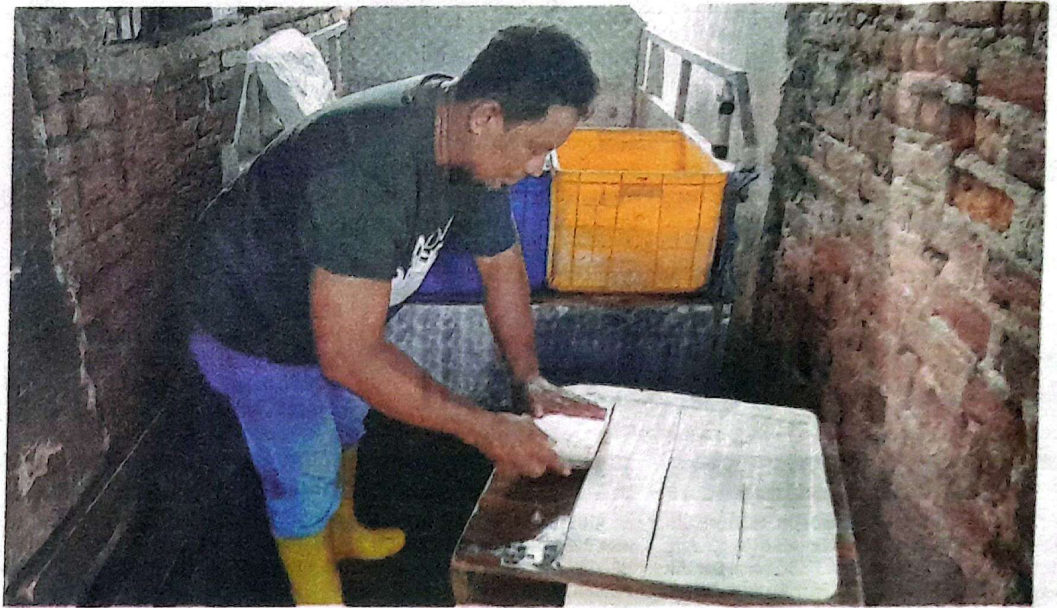


Harga Kedelai Naik, Disperindag Siapkan Operasi Pasar

KOTA-Kenaikan harga kedelai membuat sejumlah produsen tahu dan tempe di Kabupaten Sidoarjo kelimpungan. Lonjakan harga bahan baku tersebut memaksa mereka mengurangi volume produksi dan penjualan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), mengingat sebagian besar pasokan kedelai di Indonesia masih berasal dari impor.

“Harga kedelai memang sangat dipengaruhi kurs dolar. Karena kedelai berasal dari luar negeri, saat dolar naik, otomatis harga kedelai juga ikut



MELONJAK: Produsen tahu membutuhkan bahan baku kedelai yang murah dan berkualitas.

melonjak,” jelasnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Kamis (24/4).

Menanggapi kondisi tersebut, Disperindag Sidoarjo tidak tinggal diam. Widiyan-

toro menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah

● Ke Halaman 10



V

Harga Kedelai...

konkret untuk menekan gejolak harga, salah satunya dengan menggelar operasi pasar. “Ya, kami akan segera melakukan operasi

pasar,” tegasnya singkat.

Operasi pasar tersebut direncanakan akan melibatkan sejumlah supplier kedelai, dengan tujuan menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga

yang lebih terjangkau bagi para pelaku industri kecil dan menengah.

Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban produsen tahu dan tempe sekaligus menjaga

stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Kami berupaya keras agar harga di pasar tidak ikut melonjak tajam. Ini demi menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya. (sai/vga)





LOETHI/DUTA

Abdul Rokib baju putih peci hitam Ketua LPK Terobos kembali datangi PT.BAF Sidoarjo, Kamis(24/4/25)

Desak OJK dan PT BAF Selesaikan Sengketa Konsumen

SIDOARJO - Untuk kesekian kalinya LPK Terobos (Lembaga Perlindungan Konsumen) menggelar aksi protes dengan mendatangi kantor PT BAF (Bussan Auto Finance) perusahaan keuangan Jl. Diponegoro No.83 Kwadengan Timur, Lemahputro, Sidoarjo, Kamis (24/4/25).

Diberitakan sebelumnya, Koordinator aksi, Yasin, bahwa kedatangan mereka menuntut PT BAF agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait permasalahan dengan konsumen dan penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector), yang sudah diatur dalam Undang-undang Fidusia.

"Kami menolak tindakan melawan hukum berupa perampasan objek fidusia oleh debt collector di jalanan yang bertindak bak perampok dan meresahkan masyarakat," tegas Yasin.

Selain itu, LPK Terobos juga menuntut agar PT BAF menggunakan jasa debt collector sesuai dengan ketentuan POJK, agar memahami norma, tugas, dan batasan kewenangan. Mereka juga mendesak dibuatnya kontrak dan

komitmen yang berimbang antara PT BAF dan nasabah.

Kali ini Ketua LPK Terobos Abdul Rokib se usai mendatangi kantor OJK di Surabaya kemarin, kembali mendatangi kantor BAF Sidoarjo bersama beberapa anggota sembari membagikan selebaran tuntutan aksi di depan kantor PT. BAF Sidoarjo.

Abdul Rokib yang biasa disapa Abah Rokib kepada Duta Masyarakat Kamis, (24/4/25) di depan kantor PT.BAF menyampaikan tuntutan-tuntutan diantaranya, menuntut PT BAF Sidoarjo selaku lembaga keuangan mentaati UU dan POJK dengan memberikan solusi dan menyikapi dengan prinsip Perlindungan Konsumen terkait permasalahan dengan konsumen (masyarakat).

Perkara kenakalan "Lembaga keuangan seperti PT.Bussan Auto Finance (BAF) ini yang disuarakan LPK Terobos Indonesia dalam seminggu sejak Senin 14/4/25 s/d terselesaikan hanya sebagian kecil banyaknya persoalan di industri keuangan khususnya dengan konsumennya dan jadi salah satu bukti

"Kegagalan atau Ketidak Tegasan OJK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang sesuai UU dalam upaya negara (OJK) melindungi konsumen dan masyarakat," tegas Abah Rokib.

Masih kata Abah Rokib, kita tetap prosedural, dan meminta untuk unit di kembalikan kepada debitur. Yang mana BPKBnya di jaminkan di PT. BAF, jadi untuk penyelesaiannya sampai saat ini masih belum ada titik terang dan di suruh bayar.

"Jadi saya berkomitmen harus di kembalikan kembali ke debitur yakni unit Vario, pada tahun 2019. Harapannya Dan masyarakat sangat tidak menyetujui dengan adanya gaya dan tindakan premanisme yang dilakukan debt collector di jalanan," pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini tayang, sebelumnya duta.co mencoba menemui kepala cabang atau pejabat berwenang di PT .BAF ditemui perwakilan dari PT BAF Sidoarjo mengatakan pimpinan masih rapat silahkan kalau mau menunggu," ujar perwakilan BAF kepada wartawan. • Loe

DUTA

Anti Korupsi



LOETFI/DUTA

Road show anti korupsi oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadiano, di Aula SMPN 2 Sidoarjo, Rabu (23/4/25)

Tanamkan Integritas Sejak Dini

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo resmi meluncurkan Road Show Sosialisasi Anti Korupsi bagi pelajar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini digelar untuk menanamkan nilai integritas dan membangun kesadaran akan bahaya korupsi sejak usia dini.

Peluncuran program dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadiano, di Aula SMPN 2 Sidoarjo, Rabu (23/4/25). Kegiatan dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SMP negeri serta ketua OSIS se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Andjar menegaskan bahwa sosialisasi ini akan menjangkau seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun

baik satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh anak-anak di Sidoarjo memiliki kesempatan yang sama untuk belajar pentingnya menjaga integritas," ujarnya.

Menurut Andjar, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparaturnegara, melainkan juga perlu dimulai dari pembentukan karakter sejak usia sekolah. "Edukasi anti korupsi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Anak-anak adalah fondasi bangsa yang harus kita bentuk sejak dini dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

"Kami berharap siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing—baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat," tambah Andjar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan bahwa pembentukan karakter anti korupsi harus dimulai dari hal-hal sederhana yang sering ditemui siswa.

"Contoh kecil dari sikap korupsi adalah menyontek. Kebiasaan seperti ini harus mulai dihilangkan agar terbentuk generasi yang jujur dan mandiri," ungkapnya.

Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendorong pembentukan karakter siswa yang jujur dan bertanggung jawab.

siswa yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab,
sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi
dari hulu. ● **Loe**

DUTA

Bupati Lantik Ketua DPC PKDI

Sidoarjo, Memorandum

Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) se-Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029, resmi dikukuhkan Bupati Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (22/4). Pelantikan itu juga dihadiri Ketua DPD PKDI Jatim S Mahdi dan jajaran forkopimda.

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan sumpah, serta penyerahan bendera sebagai simbolis dari ketua DPD PKDI Jatim kepada Ketua DPC PKDI Sidoarjo terpilih, Budiono yang merupakan Kepala Desa Mangsangan Wetan, Kecamatan Sukodono.

Bupati menyampaikan selamat atas pengukuhan dan pelantikan ini. "Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan

selamat atas dilantiknnya PKDI Sidoarjo. Ke depan saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik," ujar Subandi.

Ia bahkan berjanji akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mas-



H Budiono

arakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap program-program pembangunan desa. "Dengan bekerja

sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada

kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, men-support seluruh program maupun kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Ketua DPC PKDI Sidoarjo Budiono usai pelantikan, mengatakan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat DPP. "Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus loyal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC Sidoarjo harus ditaati karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan AD-ART," ujarnya. (sud/san/epe)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Kasatpolairud dan 2 Kapolsek Diganti

Sidoarjo, Memorandum

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) kasatpolairud, dan dua kapolsek. Yakni kapolsek Taman dan Jabon. Acara digelar di Gedung Serbaguna Mapolresta Sidoarjo, Rabu (23/4).

Pergantian kasatpolairud ditandai dengan serah terima dari pejabat lama Kopoludwi Yarsa Pramono kepada AKP Imam Yuwono. Kopoludwi selanjutnya mengemban amanah sebagai kasubbag Rendiklat Bagjarlat SPN Polda Jatim.

Berikutnya, Kopol Rochsullullah berpindah tugas sebagai Advokat Muda 1 Bidkum Polda Jatim, menyerahkan jabatan kapolsek Taman kepada mantan Kapolsek Dukun Polres Gresik AKP Inggit Prasetyanto. Sedangkan AKP Iwan Setiawan digantikan AKP I Gde



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menyerahkan jabatan kepada pejabat baru.

Budayasa sebagai kapolsek Jabon.

Kombespol Christian Tobing menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang dilakukan pejabat lama. Hal ini agar dapat ditingkatkan para pejabat baru, terutama dalam mewujudkan kondusifitas kamtibmas di Sidoarjo.

"Agar pejabat baru langsung adaptasi dengan tugasnya, jalin sinergitas dan komunikasi aktif bersama tiga pilar, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayahnya, lalu untuk terus berpacu meningkatkan prestasi beserta anggotanya, sehingga menjadi Polisi yang dicintai dan dekat masyarakat. Tentunya dengan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, termasuk adalah secara masif turun langsung mensukseskan program Asta Cita Presiden RI," pesannya. (san/epe)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ini Harga Sewa Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rp 8 Juta per jam, Menurut CEO Deltras FC Harga Sewa Mahal

Iswin Arrizal - Selasa, 22 April 2025 | 15:01 WIB



Kepala Disporpar Sidoarjo Yudhi Iriyanto, Ssos MSI (Foto : Win)



Sidoarjo, Cakrawala.co – Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 terkait tarif sewa kawasan olahraga di Gelora Delta Sidoarjo (GDS). Harga sewa stadion GOR Delta tidak mengalami kenaikan semenjak mengalami renovasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disparapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto, Ssos MSI kepada jurnalis cakrawala.co, berdasarkan data/harga sewa stadion GDS. Paling mahal sewa mencapai Rp 40 juta (per jam), namun khusus untuk tim kebanggan masyarakat Sidoarjo Deltras FC mendapatkan harga terbaik.

"Setelah renovasi belum ada perubahan tarif sewa dan tetap sama sejak Perda nomor 1 tahun 2024. Artinya Harga sewa tidak mengalami kenaikan sejak satu tahun yang lalu. Untuk tarif atau harga sewa stadion GOR Delta Rp 8 juta/per jam, Harga tersebut bisa kami katakan termasuk harga bagus jika mengacu untuk kelas Profesional yang melakukan kegiatan menghadirkan penonton/masyarakat. Jadi masalah harga kita kompetitif," Ujar Yudhi Iriyanto.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Masih dikatakan Yudhi Iriyanto, jika dibandingkan saat PSSI menggelar turnamen internasional bertajuk Mandiri U-20 Challenge Series 2025 yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 24 hingga 30 Januari 2025. Timnas U-20 Indonesia bersaing dengan Suriah, Yordania dan India. Disporapar membebankan biaya harga sewa yakni Rp 40 juta per jam.



Renovasi GOR Sidoarjo yang mencakup Stadion meliputi berbagai aspek, termasuk perbaikan lapangan, penguatan struktur, pengembangan area sekitar stadion, pekerjaan sanitarian, sistem perpipaian, perbaikan gerbang masuk, dan pembangunan pondasi pagar. Selain itu, juga ada pembaruan di ruang ganti pemain, ruang medis, dan ruang wasit, serta penyesuaian pintu keluar masuk penonton dengan standar FIFA.

Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar GDS, serta memenuhi standar FIFA untuk menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga nasional dan internasional. Anggaran renovasi mencapai Rp 95,6 miliar. Stadion Gelora Delta Sidoarjo kini telah memiliki kursi single seat di seluruh

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Sebelumnya sempat ramai Manajemen Deltras FC secara resmi melalui Ceo Deltras FC, Amir Burhannudin mengatakan manajemen akan memikirkan pindah kandang karena harga sewa dianggap mahal.

"Kami sedang melakukan peninjauan penggunaan stadion selain Gelora Delta Sidoarjo," ujar Amir, Senin (21/4/2025).

Dia menambahkan pihak manajemen cukup realistis dengan tarif sewa stadion GDS yang naik drastis usai di renovasi oleh Kementerian PUPR.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami realistis terkait harga sewa stadion GDS. Kami sudah bersurat ke Suraja dan sedang mencari informasi di GJOS," beber Amir. Bahkan Amir mengaku, biaya sewa GDS naik usai di renovasi.

"Sebelum di renovasi kami terkena Rp 12 juta setelah di renovasi kemarin kami kena Rp 24 juta," ungkap Amir.



Harapkan Sinergi Optimal untuk Pembangunan Desa, Bupati Subandi Lantik PKDI Sidoarjo

Redaksi April 22, 2025

0



Jawapos, SIDOARJO – Pengurus Persaudaraan Kepala Desa (PKD) se – Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2025 - 2029 resmi dilantik oleh Bupati Sidoarjo H.Subandi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (22/4/2025). Acara tersebut di hadiri oleh Ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Jawa Timur S.Mahdi, jajaran Forkopimda Sidoarjo dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Acara pengukuhan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah, serta penyerahan bendera sebagai simbolis oleh Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, H. Budiono yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodana.

Pembentukan PKDI di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai wadah yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait berbagai masalah yang ada di desa, serta dengan dibentuknya PKD ini sebagai salah satu wadah menjembatani penyampaian aspirasi dari masyarakat desa untuk diteruskan kepada pusat pemerintahan.

Bupati Sidoarjo H.Subandi dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan PKDI Sidoarjo. Diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik antara kepala desa dan pemerintah daerah untuk bersama menjalankan program maupun kebijakan pemerintah dalam pembangunan Sidoarjo.

"Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan selamat atas dilantiknya PKDI Sidoarjo ini. Kedepannya saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik," ujar H. Subandi.

Pimpinan daerah akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap program-program pembangunan desa.

"Saya akan mendukung penuh setiap peran dan fungsi kepala desa untuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerahnya. Dengan bekerja sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, mensupport seluruh program maupun kebijakan pemerintah," sambungnya.

Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur S. Mahdi menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat dewan pimpinan pusat (DPP). Dalam pernyataannya, Mahdi menyoroti bahwa seluruh kepala desa harus bersikap royal serta menjunjung tinggi komitmen untuk mematuhi instruksi kebijakan yang dihasilkan dari mekanisme tersebut.

"Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus royal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan faktor keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC kabupaten Sidoarjo harus di taati karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," tutur S. Mahdi.

Perangkat desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Mereka adalah jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa melibatkan diri dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Melalui partisipasi aktif perangkat desa dalam semua tahapan pembangunan, desa dapat mengalami perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. (Tyaz)

👤 414 Pembaca



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DETIK, LANSIA, PANG, POKHONG, POKHONG

Ketua Basnaz Apresiasi dan Sigap Sikapi Laporan RTLH Warga Sumput



Admin - Ketua Basnaz Apresiasi Dan Sigap Sikapi Laporan RTLH Warga Sumput
April 23, 2025



SIDOARJO - Ditengah-tengah bangunan megah nan cantik, tampak awak media satu bangunan rumah yang hancur berantakan bahkan tidak layak dihuni. Tepatnya di desa Sumput kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/04/2025).

Baca juga :

[TNI-Polri Sigap Tolongi Wanita Paruh Baya Tergeletak di Pinggir Jalan Raya Buduran Sidoarjo](#)

Dijelaskan oleh Noveli (43) salah satu penghuni dan pemilik rumah tersebut, bahwa kejadian hancurnya rumah itu pada tanggal 1 April 2025 tepatnya pukul 23.00 Wib, setelah hujan deras yang disertai angin kencang malam itu.

"Awal kejadian itu pada 01 April 2025 tengah malam, pas lebaran pagi belum terjadi apa-apa, tapi sekira pukul 22.00 Wib keatas turun lah hujan sangat deras disertai angin kencang" jelas Noveli saat ditemui awak media dikediamannya yang sudah berantakan.

"Pada hari berikutnya hari Selasa tepatnya tanggal 02 April 2025, tengah malam tiba-tiba terdengar "kratak" seketika itu juga ada yang jatuh disebelah rumah, sontak saya kaget dan berlari keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi dengan menggunakan payung kecil ditengah derasnya hujan yang mengguyur" urai bapak yang berprofesi sebagai terapis.



Suara "kratak" yang begitu keras itu ternyata parahnya kayu penyangga genteng yang patah dan genteng yang sudah berjatuh ke bawah bahkan ada yang terlempar.

"Dari apa yang terjadi saya langsung berlari bangunkan istri, anak, adek saya juga seorang anak yatim piatu yang selama ini tinggal bersama kita, agar segera pindah menyelamatkan diri ke bagian belakang dan numpang tidur sama keponakan" tambahnya.

Dari kejadian tersebut seluruh keluarga melakukan kerjabakti menurunkan sisa genteng diatas, dengan niatan agar tidak jatuh menimpa keluarga terutama anak-anak. Dan sampai saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

"Alhamdulillah... mbak, walau rumah hancur tapi saya bersama keluarga masih diselamatkan Allah. Dengan suara runtuhnya atap dan patahnya kayu itu menjadi peringatan kita untuk segera menyelamatkan diri, makanya saya katakan sekali lagi...Allah masih melindungi kami" tandasnya dengan suara sendunya.

Mirisnya kondisi rumah itu, membuat awak media kasatmata.id langsung menghubungi para pemangku wilayah di kabupaten Sidoarjo. Respon positif dari Ketua Basnaz kabupaten Sidoarjo dan Wabup Sidoarjo.

Hanya dengan hitungan beberapa menit saja M.Chasbil Aziz Salju Sodar selaku Ketua Basnaz kabupaten Sidoarjo dari informasi yang didapat, menurunkan Yudhi salah satu anggota Basnaz Sidoarjo ke lokasi (rumah Noveli) untuk melakukan sidak, identifikasi serta dokumentasi.

"BAZNAS selaku perwakilan dr pemerintah, merasa prihatin melihat kondisi tersebut hal ini merupakan kewajiban kita untuk segera hadir menjadi jalan dan solusi untuk para penerima manfaat khususnya warga Sidoarjo yang membutuhkan uluran tangan dari BAZNAS" ucap Ketua Basnaz Sidoarjo saat di konfirmasi via WhatsApp pribadinya pada Rabu (13/04/2025).

Baca juga :

[Kejati Jatim Terima Kunjungan Peserta Sespinti Polri Dikreg Ke-34 Ta 2025](#)

BAZNAS juga mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang telah memberikan sedikit zakat infaq sedekahnya kepada BAZNAS dan kami wajib mendistribusikannya dengan cepat dan tepat sasaran. Karena cepat dan tepat itu penting untuk, agar dapat sedikit melipur luka bagi warga Sidoarjo yang membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah khususnya BAZNAS, terutama dalam kondisi ekonomi sekarang yang tidak menentu ini" pungkasnya. @dieft

desa Sumput

Noveli warga Sumput

rumah hancur

sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Setahun Lumpuh, Warga Prambon Dapat Bantuan Perbaiki Rumah dari Baznas dan Pemkab Sidoarjo

22 April 2025

oleh KILASJATIM.COM



KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Tangis haru Supardi, 60 tahun, pecah ketika Bupati Sidoarjo Subandi datang mengunjungi rumah sederhana di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Selasa (22/4/2025). Sudah satu tahun terakhir Supardi hanya bisa duduk di kursi roda akibat stroke yang dideritanya. Hari itu, ia mendapat kabar menggembirakan: rumahnya akan diperbaiki dan kebutuhan pokoknya dijamin.

Bantuan datang dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain perbaikan atap rumah yang mulai lapuk dimakan rayap, Supardi juga akan dibangun kamar mandi yang selama ini belum tersedia di rumah sepetaknya.



"Alhamdulillah, BPJS-nya sudah ditangani Dinas Sosial. Nanti juga diusulkan dapat bantuan makan dhuafa dari Baznas, sebesar Rp600 ribu per bulan," ujar Bupati Subandi, sambil menyemangati Supardi yang didampingi sang istri.

Kunjungan itu menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial tak cukup hanya melalui kebijakan. Menurut Subandi, kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat adalah bentuk nyata empati dan tanggung jawab.

Ia pun mengapresiasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang telah rutin berkontribusi melalui Baznas. "Dengan Baznas, kita bisa bergerak cepat membantu masyarakat. Saya berharap ke depan, semakin banyak perusahaan swasta yang ikut bergotong-royong," katanya.

Baznas Sidoarjo sendiri terus memperluas jangkauan bantuannya. Sepanjang 2024, tercatat 224 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berhasil direnovasi, naik signifikan dari 128 unit pada 2023.

"Kami optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, upaya mengurangi kemiskinan ekstrem akan lebih cepat tercapai," pungkas Subandi. (TAM)

Cek Berita dan Artikel yang lain di [Google News](#)

Post Views: 402
KONTEN PROMOSI





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DAERAH

Pemkab Sidoarjo Launching Kurda Dengan Bunga 2% Per Tahun

Heri Margo · 24 April 2025 · 0



SIDOARJO | [Suaralintasindonesia.com](https://suaralintasindonesia.com) -Pemkab Sidoarjo membuka akses permodalan yang mudah, bunga rendah dan angsuran murah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang tertarik dapat datang langsung ke BPR Delta Artha Sidoarjo untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda. Suku bunga yang ditawarkan hanya sebesar 2% per tahun dengan pinjaman maksimal Rp.50 juta. Program Kurda milik bank Sidoarjo itu diluncurkan Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis, (24/4).

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan launching Kurda 2025 menjadi langkah besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM. Lebih dari 60% struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari pasar tradisional hingga sentra industri rumahan sampai dari kuliner hingga kerajinan merupakan nadi utama perekonomian rakyat.

“Untuk itu, penguatan UMKM menjadi visi dan misi serta salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tidak hanya sebagai jargon, tetapi sebagai kebijakan nyata yang diarahkan agar UMKM Sidoarjo bisa naik kelas, berkembang dari skala mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari lokal menuju nasional bahkan internasional,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan tata kelola pembiayaan UMKM melalui Kurda telah disempurnakannya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 8 tahun 2025 merubah Perbup nomor 52 tahun 2023. Dalam regulasi baru tersebut suku bunga Kurda diturunkan menjadi 2% per tahun. Subsidi bunga kredit itu untuk maksimal pinjaman Rp.50 juta.

“Ini bentuk konkret keberpihakan anggaran kita terhadap ekonomi rakyat. Selain itu, anggaran subsidi bunga Kurda kami tingkatkan dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 5 Miliar. Anggaran ini adalah investasi sosial untuk membuka akses permodalan yang adil, murah, dan aman bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Disampaikannya juga bahwa hingga awal april 2025 ini, BPR Delta Artha telah menyalurkan lebih dari 2.035 pembiayaan Kurda dengan nilai total lebih dari Rp. 76 miliar. Kesuksesan program Kurda tersebut tidak hanya bergantung pada peran BPR Delta Artha atau pemerintah daerah. Namun peran strategis pemerintah desa menjadi sangat penting. Untuk itu, kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo untuk ikut serta mensosialisasikan, merekomendasikan, dan mendampingi warganya dalam mengakses pembiayaan Kurda ini. “Ini adalah capaian luar biasa, dan kita akan terus dorong agar jumlah ini terus meningkat,” ucapnya.

Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Perseroda, Sofia Nurkrisnajati Atmaja mengatakan program Kurda merupakan wujud nyata Pemkab Sidoarjo bersama BPR Delta Artha dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2025 ini dirinya menargetkan minimal 3.500 UMKM yang memperoleh fasilitas program Kurda. Selain pelaku usaha mikro dan kecil, Kurda juga ditujukan kepada pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan. “Target kami BPR Delta Artha ini dapat dapat memberikan fasilitas Kurda minimal satu desa ada sepuluh UMKM atau lebih yang mendapatkan Kurda,” katanya.

Lanjut Sofia, penerima Kurda tahun ini akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penerima Kurda akan diikutkan dalam kepersertaan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya dibayar langsung oleh BPR Delta Artha, kebijakan tersebut bentuk tanggung jawab sosial BPR Delta Artha kepada para pelaku UMKM penerima Kurda, terangnya.

“Salah satu yang menjadi nilai lebih untuk penerima Kurda tahun 2025, BPR Delta Artha akan mengikutsertakan nasabah Kurda pada program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh BPR Delta Artha,” tutupnya. (Hr)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Regional Jatim

KERJASAMA PARKIR: Lagi-lagi Dipicu 'Wanprestasi', Dishub Putus Kerjasama PT ISS Berujung Proses Hukum

"Kalau dihitung kisaran Rp 7,7 miliar yang harus disetor PT ISS ke Kasda. Karena wanprestasi, sehingga kami mengambil langkah tegas dengan memutus kerjasama pengelolaan parkir," ujar Benny Airlangga Yogaswara, SH,MM, Kepala Dishub Sidoarjo.

🕒 Apr 22, 2025 - 22:28



Benny Airlangga Yogaswara, SH,MM, Kepala Dishub Sidoarjo, dan pengelolaan parkir di kawasan GOR Sidoarjo dikelola PT ISS.

NUSADAILY.COM – SIDOARJO: Perseteruan kembali terjadi antara Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Servis (ISS), pengelola parkir di Sidoarjo. Karena menilai ~~wanprestasi~~, pihak Dishub memutus kontrak kerjasama dengan rekanan itu, yang akhirnya berujung ke proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.



Dalam lanjutan sidang perkara ini, pada Selasa (22/4/2025) siang, agendanya adalah memintai keterangan saksi dari pihak PT ISS. Namun karena berhalangan hadir, sehingga ketua majelis hakim memutuskan sidang ditunda, atau dilanjutkan pekan depan.

“Ya, tentunya kami sangat menyayangkan tidak hadirnya saksi dari PT ISS. Padahal sesuai jadwal sidang hari ini adalah keterangan saksi pihak sana, lalu pekan depan saksi dari pihak kami,” kata Benny Airlangga Yogaswara, SH,MM, Kepala Dishub Sidoarjo.

Perselisihan hukum ini berawal ketika pihak Dishub Sidoarjo memutus kontrak kerjasama dengan PT ISS karena dasarnya adalah *wangprentasi*. Salah satunya pihak rekanan tidak melaksanakan kewajiban bagi hasil kepada Pemkab Sidoarjo atas pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan kontrak kerjasama,--yang sempat diaddendum pada 2023, PT ISS telah diberi kewenangan mengelola 87 titik parkir dengan target penghasilan Rp 12 miliar pertahun. Dari hasil itu komposisi pembagiannya 55 persen harus disetor ke Kasda Pemkab Sidoarjo, lalu sisanya (45 %) menjadi hak pihak rekanan.

Namun dalam pengelolaan 2024 yang merupakan tahun ke dua setelah addendum, pihak PT ISS tidak memenuhi kewajiban menyettor bagi hasil itu ke Kasda sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Sidoarjo. “Kalau dihitung kisaran Rp 7,7 miliar yang harus disetor PT ISS ke Kasda. Karena *wangprentasi*, sehingga kami mengambil langkah tegas dengan memutus kerjasama pengelolaan parkir,” ujar Benny.

Jika meruntut awal pengelolaan parkir Sidoarjo yang dikerjasamakan dengan PT ISS, memang relatif diselimuti permasalahan pelik. Bahkan perseteruan hingga ke proses hukum antara Pemkab Sidoarjo,--dalam hal ini Dishub Sidoarjo dengan PT ISS merupakan kali kedua.

Meski sebenarnya pihak Pemkab Sidoarjo selama ini bersikap cenderung lunak. Misalnya semula PT ISS diberi kewenangan mengelola 359 titik parkir dengan target perolehan Rp 32 miliar, lalu dilakukan addendum atas kontrak kerjasama itu, sesuai tuntutan PT ISS yang disepakati oleh Pemkab Sidoarjo.

Namun sayangnya, dalam perkembangan pengelolaan parkir ini kembali memicu perseteruan kedua pihak hingga berujung ke proses hukum di PN Sidoarjo. Ini karena PT ISS dinilai *wangprentasi*,--salah satunya tidak memenuhi kewajiban bagi hasil. Sehingga Dishub Sidoarjo yang memutus kontrak kerjasama dengan PT ISS merupakan keputusan tepat sebagai langkah menyelamatkan PAD Sidoarjo dari sektor pengelolaan jasa parkir. (*/cak ful)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Daerah | Headline

Pedagang Pasar Surungan Keluhkan Tingginya Retribusi

• 24 April 2025



 <https://www.pewarta.com/zakki-husaini-kekuhan-pedagang> - Pedagang Pasar Surungan melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sidoarjo di Pendopo Desa Perambangan, Sidoarjo, Kamis (24/4/2025).



SIDOARJO, PEWARTAPOS.COM – Pedagang Pasar Surungan, Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Sidoarjo Komisi B, Kusumo Adi Nugroho, di Pendopo Balai Desa setempat, Kamis (24/4/2025). Para pedagang mengeluhkan pengelolaan pasar yang diresmikan Bupati Sidoarjo, H.Subanri, beberapa waktu lalu.

"Seperti pungutan retribusi pasar yang tinggi, lokasi bangunan lapak yang sempit, dan masalah pedagang liar yang tidak memiliki lapak di Pasar Surungan dibiarkan bebas berjualan," keluh H. Hadi, pedagang daging, mengungkapkan kekecewaan saat RDP.

"Namun fatalnya, persoalan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pengurus Bumdes yang bertanggungjawab terkait tata kelola pasar," tegasnya menambahkan.

H. Hadi dalam kesempatan ini berharap Komisi B maupun pemerintah desa menanggapi keluh kesah para pedagang. "Tolong pedagang liar disikapi dengan tegas. Karena aktivitas mereka mengakibatkan pembeli di dalam Pasar Surungan menurun hingga 50 persen. Dengan kejadian itu, pendapatan kami menurun drastis," pintanya.

Terkait restribusi karcis yang memberatkan, H. Hadi merasa keberatan dengan kebijakan yang di kelola Bumdes. "Kami merasa keberatan dengan kebijakan restribusi sebesar Rp 10 ribu hingga Rp 15 rupiah perhari. Hal ini dipengaruhi pendapatan kami yang jauh berkurang dibanding sebelum Pasar Surungan di revitalisasi," ungkapnya.

Merespon keluhan para pedagang Pasar Surungan, Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B, Kusumo Adi Nugroho, menyatakan, akan mengawal apa yang telah disepakati hari ini. "Kita lihat *next-nya* nanti. Karena harapan kami ke depan, apa yang menjadi PR hari ini *step by step* bisa berjalan semakin baik," jawabnya.

Ia menambahkan, RDP ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan para pedagang melalui surat yang dikirim ke DPRD Sidoarjo pada akhir Januari 2025 lalu. Dalam isi surat itu, para pedagang mengeluhkan keberatan atas beban retribusi yang diterapkan dalam kebijakan Pemerintah desa melalui BUMDes.

Pihaknya mengatakan, dalam pertemuan hari ini bisa berjalan dengan baik dan telah dicapai beberapa kesepakatan yang diambil karena apa yang menjadi keluhan masyarakat pedagang sudah bisa ditampung oleh Pemerintah Desa Penambangan. (zki)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home / Gaya Hidup

Bupati Sidoarjo Ajak Ramaikan Pendopo Delta Wibawa dengan Kegiatan Keagamaan



Republikjatim.Com

Rabu, 23 Apr 2025 15:32 WIB



REPUBLIKJATIM
Cepat, Akurat, Tajam, Faktual dan Terpercaya

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pendopo Kabupaten Sidoarjo menjadi sarana yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bupati Sidoarjo, Subandi pun mengajak masyarakat untuk meramaikan atau menggelar sejumlah kegiatan keagamaan di Pendopo.

"Dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo, akan memberikan keberkahan bagi Pendopo Kabupaten Sidoarjo," ujar Bupati Sidoarjo, Subandi di sela menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal dan Peringatan Milad ke 13 Majelis Taklim Az Zahra yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (23/04/2025).



Kamis, 24 Apr 2025 20:08 WIB

Didukung Kenaikan Anggaran, Sidoarjo Targetnya Raih Peringkat Utama saat Verifikasi Evaluasi KLA Tahun 2025



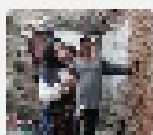
Menurut Subandi, kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo sangat berdampak positif. Seperti Majelis Taklim Az Zahra yang berdiri selama 13 tahun ini dengan jumlah jamaah yang sebagian besar kaum perempuan bisa menjadi pilar penting dalam pembangunan peradaban umat.

"Khususnya, dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat Sidoarjo," paparnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



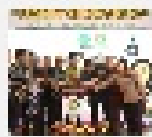
Kemala, 24 Apr 2025 18:31 WIB

Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang 3 Pekan Lalu, Rumah Warga Sumpat Disidak Wabup Sidoarjo agar Segera Direhab

Peran Majelis Taklim seperti ini yang dapat menyemarakkan Pendopo Delta Wibawa dengan kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat. Hal ini, karena majelis taklim merupakan sangat strategis dalam memperkuat akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.



"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan jamaah Majelis Taklim Az Zahra atas dedikasi dan konsistensi dalam berdakwah, membina umat dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dengan penuh cinta dan ketulusan," tegas Subandi.



Kamis, 24 Apr 2025 17:35 WIB

Bunga Pinjamannya Hanya 2 Persen Per Tahun, Pemkab dan BPR Delta Artha Sidoarjo Launching Program Kurda

Sementara Subandi juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama, agar terus bersinergi dengan para ulama dan tokoh agama dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis dan berakhlak mulia. Karena pembangunan daerah, bukan hanya soal infrastruktur fisik. Akan tetapi, juga pembangunan mental spiritual.

"Selamat Milad ke 13 kepada Majelis Taklim Az Zahra. Semoga semakin maju, semakin besar manfaatnya bagi umat dan terus menjadi penerang jalan dakwah di Kabupaten Sidoarjo. Semoga acara hari ini membawa keberkahan, memperkuat silaturahmi dan memperteguh komitmen kita dalam menjalankan ajaran Islam secara kaffah," pungkasnya. Ary/Waw

Editor : **Redaksi**

Rumah Di Terjang Angin Kencang Di Desa Sumput, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana Sigap Sidak Berikan Bantuan Perbaikan Rumah



Redaksi 3 Min Baca
24 April 2025



Foto : Wakil Bupati Sidoarjo/Hj Mimik Idayana sidak memberikan bantuan perbaikan rumah yang diterjang angin kencang di Desa Sumput.

Republiknews.com,Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo dan jajaran Forkopimka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (24/4).

Sidak kali ini dilakukan di kediaman pasangan Agung dan Siti di Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, yang atap rumahnya runtuh akibat hujan lebat disertai angin kencang pada hari Rabu malam, tanggal 2 April 2025 lalu.



banner

THIS IS
BANNER
130X600

Idtheme



Kondisi rumah milik Agung dan Siti tampak memprihatinkan. Atap rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu yang telah lapuk dimakan usia, menyebabkan bagian dalam rumah mengalami kerusakan yang berat.

Hal ini tentu membuat keluarga kesulitan untuk beraktivitas, terutama saat hujan masih sering turun dalam beberapa hari terakhir.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang menimpa keluarga tersebut.

"Kami sangat prihatin atas kondisi rumah yang dialami oleh Pak Agung dan Bu Siti. Kami telah berkoordinasi dengan Baznas Sidoarjo untuk segera melakukan perbaikan segera mungkin agar rumah ini bisa ditempati kembali dengan nyaman," ujar Hj. Mimik.

Lebih lanjut, Hj. Mimik menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam melaporkan kondisi rumah warga yang tidak layak huni atau terkena musibah.

"Jika ada warga yang mengalami hal serupa, segera laporkan kepada kelurahan atau pihak terkait. Kami akan berupaya memberikan bantuan secepat mungkin agar mereka bisa kembali tinggal di rumah dengan aman dan nyaman," tegasnya.

Selain itu, Hj. Mimik juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana alam, seperti angin kencang dan hujan deras yang kerap terjadi di musim penghujan. Ia menekankan perlunya perawatan rutin terhadap bangunan rumah untuk mencegah kerusakan lebih parah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lebih lanjut, Hj. Mimik menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam melaporkan kondisi rumah warga yang tidak layak huni atau terkena musibah.

"Jika ada warga yang mengalami hal serupa, segera laporkan kepada kelurahan atau pihak terkait. Kami akan berupaya memberikan bantuan secepat mungkin agar mereka bisa kembali tinggal di rumah dengan aman dan nyaman," tegasnya.

Selain itu, Hj. Mimik juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana alam, seperti angin kencang dan hujan deras yang kerap terjadi di musim penghujan. Ia menekankan perlunya perawatan rutin terhadap bangunan rumah untuk mencegah kerusakan lebih parah.

Agung pemilik rumah yang sehari-harinya bekerja serabutan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati, karena ia bersyukur mendapatkan bantuan renovasi rumah ini. Dengan perekonomian yang belum stabil, menyulitkan agung untuk melakukan renovasi rumah.

"Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Wakil Bupati dan Baznas Sidoarjo. Semoga perbaikan ini bisa segera dilakukan, sehingga kami bisa kembali tinggal dengan tenang bersama keluarga. Jujur saya kesulitan melakukan renovasi rumah karena untuk hidup sehari-hari saja saya pas-pasan. Dengan bantuan ini saya sangat bersyukur sekali, sekali lagi terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo," ungkap Agung, pemilik rumah yang terkena musibah.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tengah-tengah masyarakat menunjukkan komitmennya untuk hadir dan memberikan solusi nyata bagi warganya. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat, diharapkan seluruh warga Sidoarjo dapat menikmati tempat tinggal yang layak dan aman.

(AHF/ Kominfo Sidoarjo)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PKDI Sidoarjo Dilantik, Bupati H.Subandi Harapkan Sinergi Optimal untuk Pembangunan Desa

Seputar Indonesia TV
April 22, 2025

21 Views

Google News

Bagikan



Berita Terkini

@seputarindonesiatv.id

PKDI Sidoarjo Dilantik, Bupati H.Subandi
Harapkan Sinergi Optimal untuk
Pembangunan Desa

SeputarIndonesiatv.id || KOMINFO,
Sidoarjo - Pengurus Persaudaraan
Kepala Desa (PKD) se - Kabupaten
Sidoarjo periode tahun 2025 - 2029
resmi dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo
H.Subandi di Pendopo Delta Wibawa
Sidoarjo, Selasa (22/4). Acara tersebut
di hadiri oleh Ketua (Dewan Perwakilan
Daerah) DPD Persaudaraan Kepala Desa
Indonesia (PKDI) Provinsi Jawa Timur
S.Mahdi, jajaran Forkopimda Sidoarjo
dan seluruh kepala desa se-Kabupaten
Sidoarjo.

Acara pengukuhan tersebut ditandai
dengan pengucapan sumpah, serta
penyerahan bendera sebagai simbolis
oleh Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa
Timur kepada Ketua Dewan Perwakilan
Cabang (DPC) PKDI Kabupaten Sidoarjo
terpilih, H.Budiono yang juga menjabat
sebagai Kepala Desa Masangan Wetan
Kecamatan Sukodono.

Pembentukan PKDI di Kabupaten
Sidoarjo adalah sebagai wadah yang

dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait berbagai
masalah yang ada di desa, serta dengan dibentuknya PKD ini sebagai salah satu wadah menjembatani
penyampaian aspirasi dari masyarakat desa untuk diteruskan kepada pusat pemerintahan.



Bupati Sidoarjo H.Subandi dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan PKDI Sidoarjo. Diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik antara kepala desa dan pemerintah daerah untuk bersama menjalankan program maupun kebijakan pemerintah dalam pembangunan Sidoarjo.

"Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan selamat atas dilantiknya PKDI Sidoarjo ini. Kedepannya saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik," ujar H.Subandi.

Pimpinan daerah akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap program-program pembangunan desa.

"Saya akan mendukung penuh setiap peran dan fungsi kepala desa untuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerahnya. Dengan bekerja sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, mensuport seluruh program maupun kebijakan pemerintah," sambungnya.

Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur S.Mahdi menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat dewan pimpinan pusat (DPP). Dalam pernyataannya, Mahdi menyoroti bahwa seluruh kepala desa harus bersikap royal serta menjunjung tinggi komitmen untuk mematuhi instruksi kebijakan yang dihasilkan dari mekanisme tersebut.

"Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus royal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan faktor keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC kabupaten Sidoarjo harus di taati karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," tutur S. Mahdi.

Perangkat desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Mereka adalah jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa melibatkan diri dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Melalui partisipasi aktif perangkat desa dalam semua tahapan pembangunan, desa dapat mengalami perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.

Editor : Sundary





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DAERAH

Wabup Kenalkan Kuliner Khas Dalam Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Malang

Heri Margo 23 April 2025 0



SIDOARJO | Suaralintasindonesia.com – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Kota Malang di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Rabu (23/04). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Lelly Thresiyawati bersama jajaran anggota DPRD lainnya.

Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sidoarjo, khususnya pelayanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana menyampaikan bahwa pelayanan kependudukan di Sidoarjo terus ditingkatkan melalui inovasi dan integrasi layanan. “Kami ingin memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Di MPP, masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat,” ujarnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Reddy Kusuma, menjelaskan bahwa layanan Dukcapil Sidoarjo kini sudah berbasis digital dan akan terus dikembangkan. “Kami juga menjalin sinergi dengan instansi lain agar masyarakat tidak lagi direpotkan dengan proses yang panjang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wabup Mimik Idayana juga mengajak tamu ikut berkunjung ke salah satu toko pembuatan kue lumpur yang menjadi kuliner khas Sidoarjo.

Selain pelayanan publik, kami ingin memperlihatkan wajah lain dari Sidoarjo, salah satunya melalui kuliner. Kue lumpur ini salah satu ciri khas yang patut dicoba,” tambah Mimik sambil menawarkan kue lumpur kepada rombongan tamu.

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menyambut baik sambutan hangat dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. “Kami sangat mengapresiasi informasi yang disampaikan, terutama soal integrasi layanan Dukcapil. Ini akan kami jadikan referensi untuk diterapkan di Kota Malang,” ungkapnya. (Hr)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Regional Jatim

PERSELISIHAN KERJASAMA PARKIR: Saatnya Dishub Sidoarjo Ambil Alih, Inilah Komentar Kasmuin dan Cak Pri

"Lebih efektif diwakelola atau dikembalikan ke sistem pembayaran per tahun di Samsat yang tentunya harus dilakukan kajian lebih matang lagi dari berbagai aspek," kata Kasmuin, Direktur CePAD Sidoarjo.

Apr 24, 2025 - 11:42



Kasmuin, Direktur CePAD Sidoarjo, dan kawasan GOR Sidoarjo yang parkirnya dikelola PT ISS.

NUSAILY.COM – SIDOARJO ; Terjadinya perselisihan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Servis (ISS) terkait kerjasama pengelolaan parkir, semakin memantik kenjengkelan publik. Langkah Dishub Sidoarjo yang memutus kontrak kerjasama pun dinilai sudah tepat karena selama ini Pemkab Sidoarjo tidak diuntungkan dari sisi pendapatan daerah atas pengelolaan parkir yang ditangani pihak ketiga tersebut.

Kasmuin, Direktur LSM Center For Participatory Development (CePAD) Sidoarjo mengemukakan sejauh ini memang tidak ada pelarangan pengelolaan parkir diserahkan pihak ketiga. Hanya saja, ketelibatan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama ini rentan melahirkan konspirasi yang ujungnya dapat memicu persoalan baru.



Lebih lanjut, aktivis yang juga pemerhati kebijakan publik Sidoarjo ini mengemukakan berbagai permasalahan yang selama ini memicu keruwetan dalam pengelolaan parkir yang dikerjasamakan Pemkab Sidoarjo kepada PT ISS. Di antaranya mulai jumlah titik parkir yang dianggap pihak rekanan bermasalah, hingga kewajiban rekanan setor ke Pemkab Sidoarjo sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meruntut awal kerjasama pengelolaan parkir dimulai 2022, Pemkab Sidoarjo telah memberi kewenangan PT ISS mengelola parkir 359 titik di wilayah Sidoarjo dengan kewajiban menyeter ke Kasda sebesar Rp 32,090 miliar pertahun. Kerjasama ini berlaku tiga tahun, atau berakhir 2025.

Namun baru setahun berjalan, PT ISS tidak memenuhi kewajibannya dengan alasannya 359 titik parkir yang diserahkan adalah fiktif. Perselisihan pun terjadi hingga proses ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang keputusannya akhirnya dilakukan addendum atas kerjasama pada akhir 2023.

Dalam perubahan kerjasama ini, Pemkab Sidoarjo relatif bersikap lunak. Jumlah titik parkir yang semula 359, dikurangi menjadi 87 titik sesuai permintaan PT ISS berdasarkan kajian potensi di lapangan. Dari kerjasama pengelolaan parkir ini diatur bagi hasil dengan komposisi 55 persen disetor ke Kasda Pemkab Sidoarjo, sisanya (45 %) menjadi hak PT ISS dengan target penghasilan Rp 12 miliar pertahun.

Dengan perhitungan ini, pihak rekanan semestinya pada tahun 2024 sudah harus menyeter Rp 6,6 miliar atau Rp 550 juta perbulan ke Kasda. Namun sayangnya, hingga akhir tahun atau sampai sekarang kewajiban itu belum dilakukan.

Karena dinilai ~~wanprestasi~~, akhirnya pihak Dishub Sidoarjo memutus kontrak kerjasama, namun pihak PT ISS melakukan gugatan hukum yang sekarang berproses di Pengadilan Negeri Sidoarjo. "Saya kira langkah Dishub sudah tepat. Dari kronologis awal kerjasama, kok Pemkab Sidoarjo tidak diuntungkan sama sekali. Terbukti pada pengelolaan 2024 sampai memasuki tri wulan ke tiga 2025, pihak rekanan belum juga setor ke Kasda," ujar Kasmuin. "Jadi sudah saatnya Dishub mengambil alih," tambahnya.

Untuk itu, Kasmuin berharap dalam proses hukum di PN Sidoarjo ini dimenangkan Dishub Sidoarjo. Sehingga dalam pengelolaan parkir ke depannya tidak lagi dikerjasamakan dengan swasta. "Saya kira lebih efektif diwakelola atau dikembalikan ke sistem pembayaran per tahun bersamaan perpanjangan pajak kendaraan di Samsat Sidoarjo," tegasnya.

Hanya saja, kata dia, harus terlebih dahulu dilakukan kajian dari berbagai aspek yang melibatkan akademisi, praktisi maupun stakeholder lainnya. "Dan yang terpenting adalah mengedepankan pelayanan publik. Artinya masyarakat diwajibkan membayar retribusi tentunya harus mendapatkan haknya yang sepadan baik dari sisi kenyamanan dan keamanan saat parkir kendaraan," tuturnya.

Sementara itu, Ir Supriyono SH.MH, anggota Komisi B dari fraksi partai Gerindra menyarankan agar setelah putus kontrak, Dishub mengambil alih lahan parkirnya supaya ada pemasukan ke Kas daerah. Pasalnya PT ISS sudah melakukan wanprestasi, walaupun ada gugatan tetap dihadapi.

"Komisi B sebagai mitra sudah menyarankan agar pihak Dishub menguasai lahan parkir setelah putus kontrak. Dan yang membuat saya heran, sudah putus kontrak kok mereka masih menguasai," kata Supriyono, seraya mengusulkan pimpinan Komisi B segera menggelar hearing dengan Kepala Dishub terkait carut marutnya pengelolaan parkir ini.

Ke depan, lanjut Cak Pri, sapan politikus Gerindra ini menanmbahkan pihaknya tentunya siap bersama eksekutif untuk membuat regulasi yang menguntungkan Pemda Sidoarjo terkait pengelolaan parkir di Sidoarjo. "Jangan sampai pengelolaan ini, harapannya dulu untuk meningkatkan PAD malah terjadi sebaliknya," ujar Supriyono. (*/cak ful)

